

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku–buku:

- Adji, Indriyanto Seno. 2012. *Korupsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Daidit Media Press.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amir, Chaerul. 2014. *Kejaksaan Memberantas Korupsi (Suatu Analisis: Historis, Sosiologis dan Yuridis)*. Jakarta: PRO Dealdealer.
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____ dan Kodrat Wibowo. 2016. *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia. 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: BPKP Republik Indonesia.
- Basah, Sjachran. 1992. *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Basroh, Abu Daud. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Chaerudin, dkk. 2008. *Strategi Pencegahan & Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Afitama.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Utama.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____.2013. *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).

- Fuady, Munir. 2014. *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Cetakan ke 3. Jakarta: Kencana.
- Hamidi, Jazim. 1999. *Penerapan Asas – Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*. Semarang: Sinar Grafika.
- Hidayat, Arif dkk. 2005. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah Wawasan dan Instrumen Monitoring Tata Kelola Keuangan Daerah*. (Jakarta: MTI.
- H. R., Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Cetakan ke – 6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartanegara, Satochid. 2007. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1975. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- _____. 1995. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar – Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marbun, S. F., dkk. 2001. *Dimensi – Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Mas, Marwan. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Moeloeng, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moelyatno. 2009. *Asas – Asas Hukum Pidana, Cetakan ke 8*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyana, Asep N. 2016. *Dimensi Koruptif Kebijakan (Pejabat) Publik; Pergeseran Paradigma Penegak Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Medan: Penerbit Madju.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Barda Arief dan Muladi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- _____. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Edisi Kedua Cetakan Keempat*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Nurtjahjo, Hendra, dkk. 2013. *Buku Saku Memahami Maladministrasi*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.
- Pradipto, Rimawan dkk. 2016. *Korupsi Struktural, Analisis Data Base Korupsi Versi IV (2001-2015)*. Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
- Prasetyo, H. M.. 2018. *Inovasi Penegakan Hukum Berbasis Paradigma Restoratif, Korektif dan Rehabilitatif untuk Percepatan Pembangunan Nasional*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Purwaka, Tommy Hendra. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Puyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kumpas.

- Rusastra, I wayan (ed.). 2012. *Daya Saing Perekonomian Nasional, Kebutuhan Dasar dan Penguatan Efisiensi*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sibuea, Hotma P. 2015. *Ilmu Negara*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Simons. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli: Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang*. Bandung: Pioner Jaya.
- Soedarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- _____. 2002. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supramono, Gatot. 1997. *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. Bandung: Alumni.
- Sutisna, Agustina. 2017. *Memilih Gubernur Bukan Bandit*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suwarno, Yogi. 2006. *Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Pusat Kajian Administrasi Internasional, LAN RI.
- Tanya, Bernard L., dkk. 2010 *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Cetakan ke 3*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Warasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Widnyana, I Made. 2010. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum: Konsep dan Metode*. Jakarta: Setara Press.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

B. Jurnal

Darmawan, Edy. 2017. “Peranan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum* 2017, Universitas Negeri Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hutabarat, Bangga Andhika. 2017. “Kedudukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Ditinjau dari Sistem Pengawasan (Kajian Terhadap TP4D dan BPKP dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah)”. *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Vol. 4 No. 4* (2017), Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat.

Sukardi. 2016. “Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi”. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46 No. 4, Universitas Indonesia, Depok.

Widiartana, G. 2017. “Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana”. *Jurnal Justitia et Pax*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wiratman, Herlambang P. 2016. “Penelitian Sosiolegal dan Konsekuensi Metodologisnya”. *Jurnal Centre of Human Rights Law Studies (HRLS)* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

C. Kamus

Bakir, R. Suyoto. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Kharisma Publishing Group.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.

Garner, Bryan A. 1999. *Black's Law Dictionary, Eight Edition*. U.S. America: Thomson West Group

W. J. S. Poerwadarminta. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

D. Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 tertanggal 6 Mei 2015;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP – 001/ JA/ 01/ 2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi tertanggal 8 Januari 2015;

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP – 152/ A/ JA/ 10/ 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman

Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tertanggal 1 Oktober 2015;

Keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: KEP – 108/ O.3/ 10/ 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 16 Oktober 2015;

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-002/ A/ JA/ 1/ 2005 tentang Perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS – 001/ A/ JA/ 10/ 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia tertanggal 5 Oktober 2015;

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER – 014/ A/ JA/ 11/ 2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tertanggal 1 Desember 2016;

Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 700/ 8929/ SJ, Nomor KEP – 694/ A/ JA/ 11/ 2017, Nomor B/ 108/ XI/ 2017 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 119 – 49 Tahun 2018, Nomor B – 396/ F/ Fjp/ 02/ 2018, Nomor B/ 9/ II/ 2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat

Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

E. Website

Abi Sarwanto. “Penyerapan Anggaran Rendah, Akibat Ketakutan Pemda”. 1 Agustus 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150825204550-12-74471/penyerapan-anggaran-rendah-akibat-ketakutan-pemda>.

Badan Pusat Statistik (BPS). “Presentase Penduduk Miskin September 2017 Mencapai 10,12 Persen”. 3 Juni 2018.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/presentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>.

_____. “Gini Ratio Provinsi 2002-2017”. 3 Juni 2018. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116>.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya. “Profil Dinas PU Binmar Cipka”. 18 Juli 2018.

<https://ppid.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/profil-dinas-pu-binmarcipka/>.

_____. “Rencana Strategis Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa

- Tengah Tahun 2013-2018".18 Juni 2018.<https://ppid.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/rencana-strategis/>.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu). "Data Keuangan Daerah Setelah Tahun Anggaran 2006". 13 Juli 2018.<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>.
- Disporapar Provinsi Jawa Tengah. "Visi Misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah". 19 Juli 2018.<http://disporapar.jatengprov.go.id/portal/page/konten/66/VISI-DAN-MISI>.
- _____. "Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah". 19 Juli 2018.
<http://disporapar.jatengprov.go.id/portal/page/konten/67/TUPOKSI>
- _____. "Rencana Strategis". 19 Juli 2018.<http://disporapar.jatengprov.go.id/portal/page/ppid/369/disporapar-jateng-rencana-strategis>.
- Hendra Kusuma. "Rp 222 Triliun Dana Pemda Masih Mengendap di Bank". 18 Juni 2018. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3580709/rp-222-triliun-dana-pemda-masih-mengendap-di-bank>.
- Is Widodo, ed. "*Sudah 32 Kepala Daerah di Jawa Tengah Terjerat Korupsi*". 20 Juli 2018.<http://jateng.tribunnews.com/2017/09/25/sudah-32-kepala-daerah-di-jawa-tengah-terjerat-korupsi?page=all>.
- Jawa Pos National Network (JPNN). "318 Kepala Daerah Terjerat Korupsi". 7 Maret 2018. <https://www.jpnn.com/news/318-kepala-daerah-terjerat-korupsi>.
- Justitia Lawfirm & Co. "Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Pada

- Hukum Administrasi". 27 Juli 2018.<http://justitlawfirm.or.id/index.php/82-menyalahgunakan-kewenangan-dalam-tindak-pidana-korupsi-dan-penyalahgunaan-wewenang-pada-hukum-administrasi>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. 20 Mei 2018.
<http://kbbi.web.id/>
- Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. "Pengertian TP4D". 27 Februari 2018.
<http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/tp4d/pengertian>.
- Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. 2 Juli 2018.<http://kt-jateng.kejaksaan.go.id/>.
- Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. "Pencegahan/ Pemberantasan TIPIKOR & Sosialisasi TP4D". 18 Juni 2018.
https://www.birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_makalah/TIPIKOR.ppsx.
- Syamsul, ed. "TP4D Siap Dampingi Bupati". 3 Agustus 2018.
<https://wordnews2016.wordpress.com/2016/05/03/tp4d-siap-dampingi-bupati/>.
- Transparency International. "Corruption Perceptions Index 2016". 17 Juni 2018.
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#resources.
- Wikipedia. "Jawa Tengah". 2 Agustus 2018.https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah